

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2025**

KATA PENGANTAR

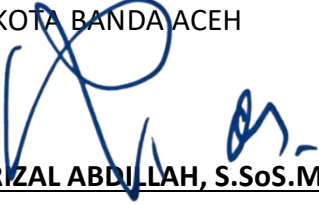
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunianya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta strategis dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 terdiri dari pendahuluan; gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; permasalahan dan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Renstra ini akan menjadi sistem kendali dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Dengan adanya Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Kesbangpol dan seluruh stakeholder terkait untuk mampu memberikan Informasi pada setiap pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 2 Desember 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH


RIZAL ABDILLAH, S.SoS.M.Si
NIP. 19731218 1993 03 1 005



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888 Faksimile (0651) 22888,
Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 -2029**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Praturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJM dan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

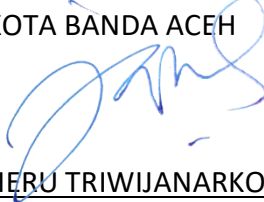
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhan 1446 H

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH



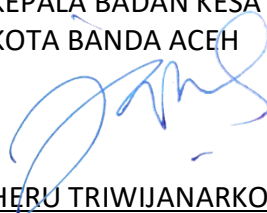
HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800104 199810 1 001

LAMPIRAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 17 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MARET 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PenanggungJawab
2	sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3	Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa	Anggota
4	Kabid. Politik dalam Negeri	Anggota
5	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6	Kabid. Penanganan Konflik dan Kewaspadaaan Nasional	Anggota
7	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH



HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800104 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol.....	14
2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029	34
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Strategi 34	
TABEL 3.2.....	36
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
BAB V PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perincian Jumlah Jabatan Struktural	23
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025	24
Table 2.3	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan ...	25
Table 2.4	SDM Badan Kesbangpol (Berdasarkan Jabatan)	26
Table 2.5	Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2025	28
Table 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024	30
Tabel 2.7	Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	32
Tabel 2.8	Teknik Pengumpulan Isu Strategis Daerah	33
Tabel 3.1	Penahapan/Arah Kebijakan Kesbangpol Tahun 2026-2030	35
Tabel 3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran	36
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	38
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	40
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030	46
Tabel 4.4	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Banda Aceh menyusun Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Renstra Badan Kesbangpol memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan memperhatikan:

- 1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- 2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Rancangan Renstra Badan Kesbangpol melalui Renja Badan Kesbangpol sampai dengan Tahun 2025;
- 3) Evaluasi keluaran (output) dari kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2025;
- 4) Isu-isu strategis yang terkait dengan urusan dan tugas pokok Badan Kesbangpol;
- 5) Kebijakan nasional;

- 6) Regulasi yang berlaku dan
- 7) Saran dan masukan dari stakeholder pembangunan daerah. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan pada Rancangan Renstra Badan Kesbangpol selaras dengan program pembangunan di tingkat Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan pembangunan nasional di tingkat pusat untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Provinsi Aceh Tahun 2025-2045;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
19. Qanun Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJM menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih terinci dan spesifik sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam mendukung visi dan misi Walikota Banda Aceh.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsinya.
3. Menjadi acuan dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari, maksud serta tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Bab ini menyampaikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesbangpol berdasarkan peraturan yang berlaku, menggambarkan sumber daya yang tersedia saat ini meliputi; sumber daya manusia dan sarana prasarana. Juga digambarkan sejauhmana pencapaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan selama periode RPD Tahun 2023-2026, dan identifikasi berbagai tantangan serta peluang pengembangan pelayanan berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut. Menyampaikan berbagai hasil identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan Badan Kesbangpol, dan menentukan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESBANGPOL.

Menjelaskan tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029. Menjelaskan apa saja strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan hasil identifikasi program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Badan Kesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui setiap strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Menyampaikan indikator capaian Badan Kesbangpol yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2025-2029).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesbangpol melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan susunan, tugas pokok dan fungsi kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

a. Tugas

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik,.
4. Pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
5. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing.
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan.
7. Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
9. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh terdiri dari;

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2. Sekretariat Badan

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menjalankan tugasnya sekretaris membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

3. Bidang terdiri dari;

3.1 Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3.2. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Politik Dalam Negeri

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-nsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik , pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mem pengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas

- d. kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil
 - e. Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3.3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan

masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi Kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3.4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, tabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategic dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan

penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga Kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol sampai dengan tahun 2025 sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

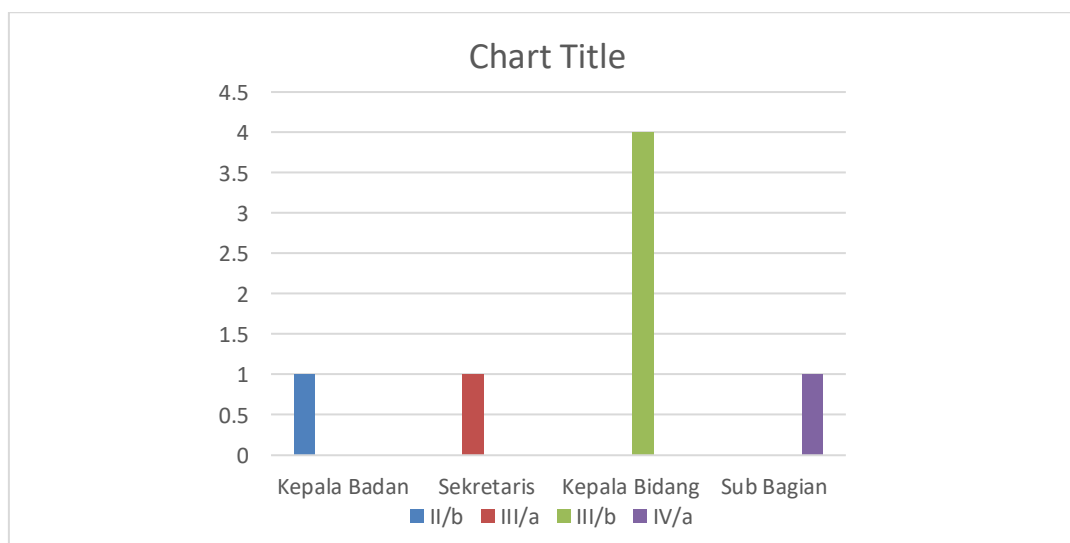
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.1
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon						Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	Kepala Badan	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4.	Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	1
Total		-	-	1	1	4	1	7

Sumber: Subbag Umum Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

GRAFIK 2.1
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL



2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pangkat/golongan

Jumlah Pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol berdasarkan tingkat pangkat/golongan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

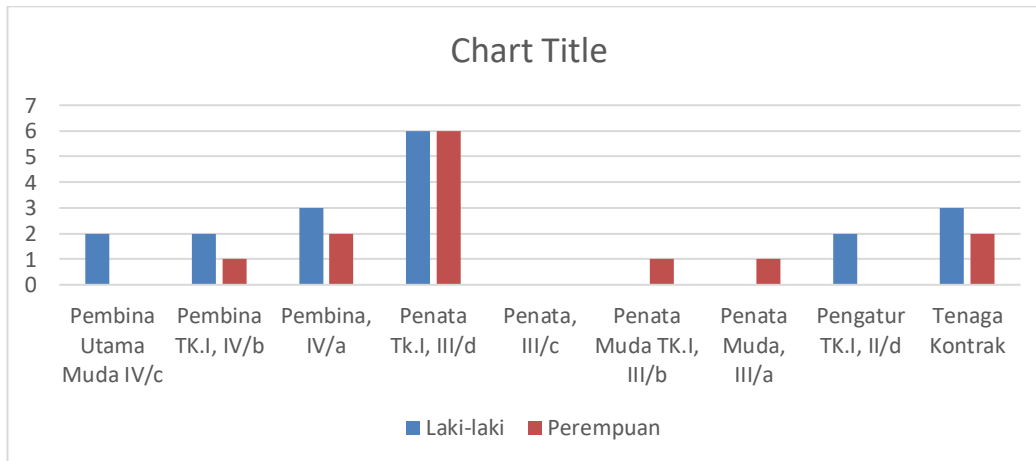
TABEL 2.2.
JUMLAH PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2025

NO	Pangkat/Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	Pembina Utama Muda IV/c	2	0	2	
2	Pembina TK.I, IV/b	2	1	3	
3	Pembina, IV/a	3	2	5	
4	Penata Tk.I, III/d	6	6	12	
5	Penata, III/c	0	0	0	
6	Penata Muda TK.I, III/b	0	1	1	
7	Penata Muda, III/a	0	1	1	
8	Pengatur TK.I, II/d	2	0	2	
	Jumlah PNS	15	11	26	
	Non PNS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)	
12	Tenaga Kontrak	3	2	5	
	Jumlah Non PNS	3	2	5	
	JUMLAH PNS + NON PNS	18	13	31	

Sumber: Subbag Umum Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

Dari data diatas dapat dilihat Jumlah pegawai pada Badan Kesbangpol sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang Tenaga ASN dan 5 (lima) orang tenaga Non ASN.

GRAFIK TABEL 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan
Pangkat/ Golongan Tahun 2025



Sumber: Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

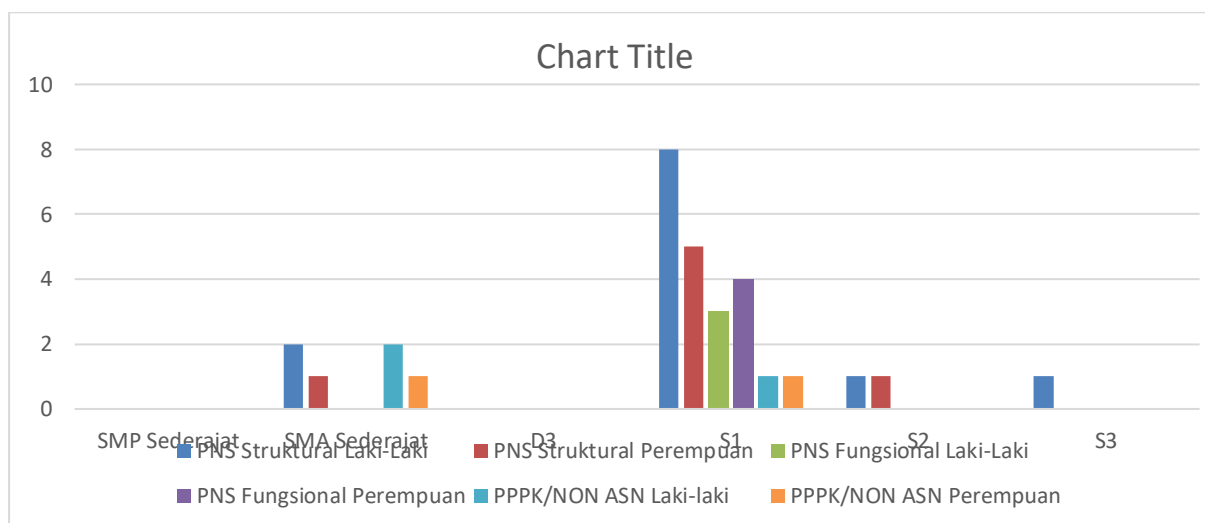
TABEL 2.3.

JUMLAH PEGAWAI BADAN KESBANGPOL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	PNS				PPPK/NON-ASN		Jumlah
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL		L	P	
		L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	1	0	0	2	1	6
3	D3	0	0	0	0	0	0	0
4	S1	8	5	3	4	1	1	22
5	S2	1	1	0	0	0	0	2
6	S3	1	0	0	0	0	0	1

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

GRAFIK 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan



sumber: Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja Badan Kesbangpol adalah ketersediaan barang inventaris untuk mendukung kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesbangpol.

TABEL 2.4
SDM BADAN KESBANGPOL (BERDASARKAN JABATAN)

NOMOR	JENIS JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SESUAI ABK	PNS		PPPK		Jumlah	KEKURANGAN/K ELEBIHAN TENAGA	KETERANGAN	PERSENTASE
			L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan/Dinas/Sekretariat	1	1	0	0	0	1	0		100
2	Sekretaris	1	0	1	0	0	1	0		100
3	Kepala Bagian/Bidang	4	1	1	0	0	2	2		50
4	Kepala Subbag Umum/Kepegawaian	1	0	1	0	0	1	0		100
5	Perencana Ahli Muda	1	0	1	0	0	1	0		100
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	8	3	2	0	0	5	3		62.5
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	0	1	0	0	1	0		100
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	0	0	0	0	1		0
9	Bendahara	1	0	1	0	0	1	0		100
10	Pengelola Keuangan	2	0	0	0	0	0	2		0
11	Analisis Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	1		0
12	Analisis Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	1		0
13	Analisis Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	0	1		0
14	Pengelola Umum Operasional	1	0	0	0	0	0	1		0
15	Pranata Trantibum	1	0	0	0	0	0	1		0

NOMOR	JENIS JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SESUAI ABK	PNS		PPPK		Jumlah	KEKURANGAN/K ELEBIHAN TENAGA	KETERANGAN	PERSENTASE
			L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Analisis Intelijen	1	0	0	0	0	0	1		0
17	Analisis Wawasan Kebangsaan	1	1	0	0	0	1	0		100
18	Analisis Keamanan	1	1	0	0	0	1	0		100
19	Analisis Politik Dalam Negeri	1	0	0	0	0	0	1		0
20	Analisis Partai Politik	1	1	0	0	0	1	0		100
21	Analisis Organisasi Kemasyarakatan	1	0	0	0	0	0	1		0
22	Analisis Sosial Budaya	1	1	0	0	0	1	0		100
23	Analisis Ketahanan Budaya	1	1	0	0	0	1	0		100
24	Pengelola Data	6	1	0	0	0	1	5		16.67
25	Pengelola Gaji	1	0	0	0	0	0	1		0
26	Pengelola Kepegawaian	1	0	1	0	0	1	0		100
27	Pengelola Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0	0	1		0
28	Pengadmiistrasian Keuangan	1	1	0	0	0	1	0		100
29	Pengadmiistrasian Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	1		0
30	Pengadmiistrasian Persuratan	1	0	0	0	0	0	1		0
31	Pengelola Teknologi Informasi	1	0	0	0	0	0	1		0
32	Pengadministrasian Umum	5	1	1	2	1	5	0		100
33	Pengelola Bimbingan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	1		0
34	Pengelola Pemantauan	1	1	0	0	0	1	0		100
35	Pengolah data Intelijen	1		0	0	0	0	1		0
36	Pengolah Data	4	1	1	0	0	2	2		50
37	Supir	1	1	0	0	0	1	0		100
38	Cleaning Service	1	1	0	0	0	1	0		100
TOTAL		61	17	11	2	1	31	30	0	

Sumber : Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Badan Kesbangpol, Tahun 2025

Kondisi sumber daya pada perangkat daerah belum memadai, karena sesuai dengan analisis jabatan, jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 61 (enam puluh satu) pegawai tetapi baru terisi sebanyak 31 (tiga puluh) orang perhitungan hingga bulan Mei 2025 secara keseluruhan masih kekurangan SDM sebanyak 30 orang. Dengan kondisi SDM yang ada Badan Kesbangpol berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas perangkat daerah.

Tabel 2.5 menyajikan inventaris barang pada Badan Kesbangpol berdasarkan data Tahun 2025.

TABEL 2.5
Sarana dan Prasarana Kerja tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	KEKURANGAN /KELEBIHAN
				Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	M ²	1.245	Baik	0		
2	Bangunan Gedung Kantor	Unit	2	2	0	2	0
3	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	2	1	1	2	0
4	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	1	0	1	1	0
5	Ruang Rapat Kapasitas 100 Orang	Unit	0	1	0	1	1
6	Komputer	Unit	28	19	9	28	0
7	Printer	Unit	28	12	16	28	0
8	Mobiler	Unit	32	28	4	32	0
9	Lemari Arsip	Unit	10	6	2	8	-2
10	Kursi	Unit	52	48	12	60	8
11	Printer Gaji	Unit	1	1	0	1	0
12	Meja Tamu	Set	2	2	0	2	0
13	Kursi Tamu	Set	2	2	0	2	0
14	Filling Cabinet	Unit	15	12	0	12	-3
15	Laptop	Unit	5	3	2	5	0
16	Kursi Tunggu	Set	2	1	0	1	-1
17	Harddisk	Unit	6	4	2	6	0
18	Kendaraan Roda 2	Unit	2	1	0	1	-1
19	AC	Unit	0	7	0	7	7
20	UPS	Unit	31	5	26	31	0

Sumber : Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Badan Kesbangpol, Tahun 2025

C. Kinerja Pelayanan Kesbangpol

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol berdasarkan sasaran/target Rancangan Renstra Badan Kesbangpol periode Tahun 2023-2024 menurut indikator kinerja Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=7/5
	IKU							
	Indeks Ketentraman Umum	Nilai	74.63	74.64	58.88	78.29%	78.89	1.05
	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	Persen	100%	100%	66.70%	94.40%	66.70	94.40
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persen	0	73.79%	0	73.08%	0.00	99.04
	Persentase Ormas, OKP dan LSM yang Aktif	Persen	49.25	50.13	51.05%	67.39%	1.04	1.34
	IKK							
	Indikator Program Renstra Lalu							
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100.00	100
2	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	85%	85%	85%	85%	100.00	100
3	Persentase tersedianya data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	85%	85%	0%	0%	0.00	0
4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	85%	85%	85%	85%	100.00	100
5	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persen	100%	100%	100%	100%	100.00	100

Dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi IKU Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial untuk tahun 2023 sebesar 66.7 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%, hal ini dikarenakan hingga akhir 2023 masih ada yang sedang ditangani, demikian juga untuk tahun 2024. Untuk Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada juga dapat dilihat Realisasi yang terjadi belum mencapai dari target yang ditentukan hal ini disebabkan kurangnya partisipasi Masyarakat dalam Pelkada 2024, sedang untuk Persentase Ormas, OKP dan LSM yang aktif dapat dilihat Realisasi untuk tahun 2023 dan 2024 melebihi target yang ditetapkan.

Kota Banda Aceh termasuk kota yang kondusif walaupun masih ada hal-hal kecil terjadinya Potensi konflik sosial tentang gangguan keamanan dan kenyamanan namun masih bisa diatasi dikarenakan hasil koordinasi dan kerjasama antara forkopimda, instansi vertikal dan masyarakat. Organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan kesbangpol dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Monev Kesbangpol Rata-rata diatas 50 % dinyatakan aktif.

Selain capaian-capaian diatas Badan Kesbangpol juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat mendukung kinerja Badan Kesbangpol yaitu:

1. Capaian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Tahun 2024), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk tingkat Kota (Tahun 2024), Adapun Capaian yang diperoleh dari pembentukan FKUB meliputi; Penguatan Moderasi beragama melalui Focus Group Discussion (FGD) untk menyukseskan acara PON XXI dan Pilkada damai serta menciptakan lingkungan yang toleran dimana semua umat beragama dapat beribadah denga naman tanpa gangguan.
Adapun capaian yang diperoleh dengan dibentuknya FKDM dapat membantu pencegahan awal terhadap ancaman dan gangguan keamanan di Kota Banda Aceh dengan cara melaporkan keadaan situasi dan kondisi daerah.
2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan intansi vertikal seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Imigrasi dan Badan Intelijen Nasional (BIN) melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Banda Aceh dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Kota Banda Aceh;
3. Terbentuknya 20 (dua puluh) Gampong Bersinar (Bersih Narkoba) yaitu: Gp. Beurawe pada tahun 2020, Gp. Mulia pada tahun2022, Gp. Penjeurat Tahun 2022, Gp. Lamdingin pada tahun 2022, Gp. Lampulo (2022), Gp. Merduati (2022), Gp. Lambhuk (2022), Gp. Pango Deah (2022), Gp. Pineung (2022), Gp. Kota Baru (2022), Gp. Geuceu Meunara (2022), Gp. Pande (2022), Gp. Lampaloh (2022), Gp. Peulanggahan (2023), Gp. Deah Geulumpang (2023), Gp. Mibo (2024), Gp. Geuceu Inem (2024), Gp. Pie (2025) dan Gp. le Masen Kayee Adang (2025).
4. Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat dan pelajar;
5. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah atau negara. Indeks ini mengukur tiga aspek utama: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antarumat beragama. Pada tahun 2024 capaian IKUB di Kota Banda Aceh mencapai 76.47.

D. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol secara umum adalah seluruh elemen masyarakat di tingkat daerah, yang mencakup masyarakat beragama, masyarakat suku, partai politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi masyarakat sipil, serta kelompok-kelompok lain yang memiliki potensi untuk menjaga atau mengganggu kerukunan dan stabilitas daerah. Fokus utamanya adalah meningkatkan kerukunan, ketahanan nasional, dan partisipasi politik yang demokratis, masyarakat

2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Permasalahan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol Memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2023-2024 serta tantangan yang semakin berat pada periode 2025-2029 maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) di Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh;
- Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
- Belum optimalnya tata Kelola data yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol;
- Belum optimalnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, deteksi dini dan cegah dini atas potensi konflik serta etika politik.

Tabel 2.7

PERUMUSAN MASALAH POKOK, MASALAH DAN AKAR MASALAH PD

No	Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Membina, menjaga, dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menangani isu-isu terkait ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, dan kewaspadaan nasional.	Belum optimalnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, deteksi dini dan cegah dini atas potensi konflik serta etika politik	Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme	Pengaruh global dan potensi isu disintegritas
				Kemajemukan etnis budaya dan agama	Belum Optimalnya pendidikan wawasan kebangsaan
					Belum Optimalnya penanaman nilai toleransi antar suku, agama dan adat istiadat
					Kurang Terfasilitasinya ruang dialog antar elemen masyarakat
					Perbedaan pandangan politik

b. Isu Strategis

Isu strategis Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama

Terkait dengan hal tersebut, kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh menjadi fokus yang mencakup beberapa aspek, termasuk: toleransi antar umat beragama, pelaksanaan ibadah di tempat ibadah masing-masing, dan pemahaman serta komunikasi antar umat beragama untuk mencegah konflik. meskipun ada beberapa isu yang muncul, secara umum, umat beragama di Banda Aceh dapat hidup berdampingan dengan nyaman dan menjalankan ibadahnya. Namun, tetap diperlukan upaya untuk menjaga dan memperkuat kerukunan tersebut, serta mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul.

TABEL 2.8
TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DAERAH

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pembinaan ideologi, politik, dan keamanan guna mendukung ketahanan nasional	Belum optimalnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, deteksi dini dan cegah dini atas potensi konflik serta etika politik		Globalisasi dan perkembangan teknologi serta informasi yang masif	Keragaman budaya, suku, agama dan etnis	Inklusifitas dalam kehidupan beragama	Penguatan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, deteksi dini dan cegah dini atas potensi konflik serta etika politik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesbangpol. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 adalah:

“Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik”

sedangkan **sasaran** yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

“Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas wilayah”.

Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas wilayah mengacu pada situasi di mana suatu daerah memiliki tingkat keamanan, ketertiban, dan kedamaian yang baik, berarti berkurangnya potensi konflik, kejahatan, dan gangguan sosial lainnya. Kondusifitas juga mencakup lingkungan yang memungkinkan kegiatan ekonomi, sosial, dan politik berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah **Strategi**

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Banda Aceh mencakup upaya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta memfasilitasi dialog antar elemen masyarakat. Strategi yang digunakan:

1. Penguatan Toleransi Antar Umat Beragama, Kepercayaan, Suku, Budaya dan Adat Istiadat melalui Peningkatan Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan dalam rangka meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah potensi konflik.
2. Penguatan stabilitas wilayah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Kebangpol adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesabngpol dan Arah Kebijakan RPJMD serta selaras dengan Strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kesbangpol.

TABEL 3.1
PENAHAPAN/ ARAH KEBIJAKAN KESBANGPOL 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
-1	-2	-3	-4	-5
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Stabilitas Sosial	Pengutan Kerjasama Lintas Sektor dalam Penanganan Konflik dan Diteksi Dini	Penguatan Pemantauan dan Penanganan Isu Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Hankam	Evaluasi Efektifitas Program Kebangsaan dan Ketahanan Ideologi	Mendorong Keberlanjutan dan Reflikasi Program Unggulan
1. Pemetaan Potensi Konflik dan ATHG	1. Penyelenggaraan Pendidikan Politik, wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan Bagi Masyarakat sejak Dini	1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Budaya dan antar Umat Beragama Bagi Masyarakat dengan Pelaksanaan Bela Negara untuk Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	1. Evaluasi Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama	1. Menyusun Keberlanjutan Program dan Memperluas Cakupan Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sosialisasi Nilai Toleransi dan wawasan Kebangsaan	2. Pengutan Jejaring Intelijen		2. Optimalisasi Fungsi FKDM dan Pengutan Tim Kewaspadaan Dini	
3. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	3. Penguatan partisipasi politik	2. penguatan partisipasi politik	3. Pendidikan Politik untuk peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	

TABEL 3.2
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	76,47	78,29	79,81	81,33	82,85	84,37	85,89	
		Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas wilayah	Persentase penyelesaian Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan gangguan (ATHG) Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya (%)	100	100	100	100	100	100	100	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2025-2029 berdasarkan permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodevikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.

Program, kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan yang terperinci dapat dilihat pada tabel Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh untuk Tahun 2025-2029 adalah :

Tabel 4.1.
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					10,699,102,874		10,747,802,874		20,803,352,874		40,859,458,374		10,916,124,929	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,199,102,874		5,192,802,874		5,192,802,874		5192803374		5,192,802,874	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	BB	BB	5,199,102,874	BB	5,192,802,874	BB	5,192,802,874	BB	5192803374	BB	5,192,802,874	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					418,844,900		401,900,000		401,900,000		501900000		402,222,055	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan)	1	3	3	418,844,900	3	401,900,000	3	401,900,000	3	501900000	3	402,222,055	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3,377,767,500		3,483,255,000		13,513,255,000		33494255000		3,651,255,000	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	0,85	0,85	3,377,767,500	1,06	3,483,255,000	1,24	13,513,255,000	1,41	33494255000	1,41	3,651,255,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					12,369,800		85,000,000		85,000,000		85000000		85,000,000	
Meningkatnya Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (%)	67,39	55	57	12,369,800	60	85,000,000	62	85,000,000	65	85000000	70	85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					334,243,400		314,845,000		340,395,000		314845000		314,845,000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	-	80	82	334,243,400	85	314,845,000	87	340,395,000	90	314845000	92	314,845,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1,356,774,400		1,270,000,000		1,270,000,000		1270655000		1,270,000,000	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%)	94	100	100	1,356,774,400	100	1,270,000,000	100	1,270,000,000	100	1270655000	100	1,270,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
		Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas wilayah			Persentase penyelesaian Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan gangguan (ATHG) Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Demokrasi dan Budaya Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Terlaksananya Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4PNGN dan PN)	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

TABEL 4.3.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2026-2030

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN										KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				10,699102,874		10,747,802,874		20,803,352,874		40,859,458,374		10,916,124,929		
8	0 1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10,699,102,874		10,747,802,874		20,803,352,874		40,859,458,374		10,916,124,929		
8	0 1	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	5,199,102,874		5,192,802,874	BB	5,192,802,874	BB	5,192,803,374	BB	5,192,802,874		
8	0 1	1	1. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5 Doku men	21,455,500		100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	
8	0 1	1	1. 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Doku men	5 Dokum en	21,455,500		5 Doku men	20,000,000	5 Dokum en	20,000,000	5 Dokum en	20,000,000	5 Doku men	20,000,000	
8	0 1	1	1. 0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Lapor an	0	-		5 Lapor an	5,000,000	5 Lapora n	5,000,000	5 Lapor an	5,000,000	5 Lapor an	5,000,000	
8	0 1	0 1	1. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	12 Lapora n	4,584,178,474		100%	4,632,178,474	100%	4,632,178,474	100%	4,632,178,974	100%	4,632,178,474	
8	0 1	0 1	1. 0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/ bln	28 Org/ bln	4,584,178,474		28 Org/ bln	4,632,178,474	28 Org/ bln	4,632,178,474	28 Org/ bln	4,632,178,974	28 Org/ bln	4,632,178,474	
8	0 1	0 1	1. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	100%		-		100%	18,700,000	100%	18,700,000	100%	18,700,000	100%	18,700,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	01	01	105	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	1 Paket	18,700,000	1 Paket	18,700,000	1 Paket	18,700,000	1 Paket	18,700,000	
8	01	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	100%	8 Laporan	79,529,900	100%	79,519,222	100%	79,519,222	100%	79,519,222	100%	79,519,222	
8	01	01	106	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	420,200	1 Paket	1,519,222	1 Paket	1,519,222	1 Paket	1,519,222	1 Paket	1,519,222	
8	01	01	106	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	21,232,900	3 Paket	20,000,000	3 Paket	20,000,000	3 Paket	20,000,000	3 Paket	20,000,000	
8	01	01	106	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	7,876,800	4 Paket	8,000,000	4 Paket	8,000,000	4 Paket	8,000,000	4 Paket	8,000,000	
8	01	01	106	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	5 Laporan	50,000,000	15 Laporan	50,000,000	15 Laporan	50,000,000	15 Laporan	50,000,000	15 Laporan	50,000,000	
8	01	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	2 Laporan	30,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	
8	01	01	107	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	3 Paket	-	2 Paket	5,000,000	3 Paket	5,000,000	3 Paket	5,000,000	3 Paket	5,000,000	
8	01	01	107	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	30,000,000	10 Unit	10,000,000	10 Unit	10,000,000	10 Unit	10,000,000	10 Unit	10,000,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10
8	0 1	0 1	1. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	24 Lapora n	251,305,000	100%	203,305,000	100%	203,305,000	100%	203,305,000	100%	203,305,000	
8	0 1	0 1	1. 0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapor an	12 Lapora n	42,650,000	12 Lapor an	42,650,000	12 Lapora n	42,650,000	12 Lapora n	42,650,000	12 Lapor an	42,650,000	
8	0 1	0 1	1. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapor an	12 Lapora n	208,655,000	12 Lapor an	160,655,000	12 Lapora n	160,655,000	12 Lapora n	160,655,000	12 Lapor an	160,655,000	
8	0 1	0 1	1. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	5 Lapora n	232,634,000	-	219,100,178	-	219,100,178	-	219,100,178	-	219,100,178	
8	0 1	0 1	1. 0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	177,340,000	2 Unit	177,340,000	2 Unit	177,340,000	2 Unit	177,340,000	2 Unit	177,340,000	
8	0 1	0 1	1. 0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	5,294,000	23 Unit	5,294,000	25 unit	5,294,000	25 Unit	5,294,000	Unit	5,294,000	
8	0 1	0 1	1. 0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	36,466,178	1 Unit	36,466,178	1 Unit	36,466,178	1 Unit	36,466,178	
8	0 1	0 2			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancaasila dan Karakter Kebangsaan	67.39 %	3 Kegiat an	418,844,900	60%	401,900,000	62%	401,900,000	65%	501,900,000	70%	402,222,055	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				5		6		7		8		9		10
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	3 Kegiatan	418,844,900	5 Kegiatan	401,900,000	5 Kegiatan	401,900,000	5 Kegiatan	501,900,000	5 Kegiatan	402,222,055	
8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	96 Orang	69,031,300	96 Orang	100,000,000	96 Orang	100,000,000	96 Orang	165,000,000	96 Orang	100,000,000	
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	100 Orang	116,672,600	100 Orang	115,000,000	100 Orang	115,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	115,322,055	
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	NA	8 Orang	233,141,000	8 Orang	186,900,000	8 Orang	186,900,000	8 Orang	186,900,000	8 Orang	186,900,000	
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	85%	0.85%	3,377,767,500	1.06 %	3,483,255,000	1.24%	13,513,255,000	1.41%	33,494,255,000	1.41%	3,651,255,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	85%	85%	3,377,767,500	85%	3,483,255,000	85%	13,513,255,000	85%	33,494,255,000	85%	3,651,255,000	
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	64,512,500	100 Orang	70,000,000	100 Orang	10,070,000,000	100 Orang	30,070,000,000	100 Orang	138,000,000	
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	-		100 Orang	100,000,000	100 Orang	130,000,000	100 Orang	111,000,000	100 Orang	200,000,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10
8	01	03	101	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3,313,255,000	2 Laporan	3,313,255,000	2 Laporan	3,313,255,000	2 Laporan	3,313,255,000	2 Laporan	3,313,255,000	
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	85%	57%	12,369,800	60%	85,000,000	62%	85,000,000	65%	85,000,000	70%	85,000,000	
8	01	04	101		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	1 Kegiatan	12,369,800	3 Kegiatan	85,000,000	3 Kegiatan	85,000,000	3 Kegiatan	85,000,000	3 Kegiatan	85,000,000	
8	01	04	101	003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	-	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	
8	01	04	101	004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	-	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	2 Lapora n	12,369,800	2 Lapor an	85,000,000	2 Lapora n	85,000,000	2 Lapora n	85,000,000	2 Lapor an	85,000,000	
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan diDaerah yang Dilaksanakan	100%	82%	334,243,400	85%	314,845,000	87%	340,395,000	90%	314,845,000	92%	314,845,000	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4PNGN dan PN)	100%	2 kegiat an	334,243,400	4 Kegiat atan	314,845,000	3 Kegiat an	340,395,000	3 Kegiat an	314,845,000	4 Kegiat an	314,845,000	
8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	NA	-	-	1 Doku men	25,000,000	-	-	-	25,000,000	1 Doku men	25,000,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET					
								2026		2027		2028		2029			2030				
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU			
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10			
8	0	1	0	5	1	0	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	37,126,300	100 Orang	139,845,000	100 Orang	139,845,000	100 Orang	139,845,000			
8	0	1	0	5	1	0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	297,117,100	100 Orang	150,000,000	100 Orang	200,550,000	100 Orang	150,000,000			
8	0	1	0	6				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	1,356,774,400	4 Dokumen	1,270,000,000	4 Dokumen	1,270,000,000	4 Dokumen	1,270,655,000	4 Dokumen	1,270,000,000	
8	0	1	0	6				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	3 Dokumen	1,356,774,400	4 Dokumen	1,270,000,000	4 Dokumen	1,270,000,000	4 Dokumen	1,270,655,000	4 Dokumen	1,270,000,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	-	-	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	25 Orang	25,614,800	25 Orang	45,000,000	25 Orang	45,000,000	25 Orang	45,655,000	25 Orang	45,000,000	
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1,078,139,800	2 Laporan	1,000,000,000	2 Laporan	1,000,000,000	2 Laporan	1,000,000,000	2 Laporan	1,000,000,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUT COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KET		
								2026		2027		2028		2029			2030	
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		TARG ET	PAGU
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2 Doku men	2 Dokum en	253,019,800	2 Doku men	200,000,000	2 Dokum en	200,000,000	2 Dokum en	200,000,000	2 Doku men	200,000,000	

Tabel 4.4

Program, kegiatan, Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	OUT COME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Badan Kesbangpol mempunyai 3 Program Prioritas dan 3 sub kegiatan penunjang program prioritas pada Badan Kesbangpol.

TABEL 4.5
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol untuk Tahun 2025-2030 terdiri 2 Indikator dengan rumusan indikator sbb:

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	76,47	78,29	79,81	81,33	82,85	84,37	85,89	
3.	Persentase penyelesaian Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan gangguan (ATHG) Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)= nilai dari survei dalam mengukur dan menilai kondisi kerukunan antar umat beragama
2. Persentase Penanganan Potensi Konflik Politik =

$$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Politik}}{\text{Jumlah Potensi Konflik yang ditangani}} \times 100 \%$$

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Renstra Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5(lima) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini setiap tahun, maka akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada Renstra ini.